

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Olahraga rekreasi merupakan kegiatan fisik yang dilakukan secara sukarela pada waktu luang dengan tujuan kesenangan, kesehatan, dan kebugaran, tanpa paksaan atau aturan yang mengikat. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 Pasal 1 ayat 12. Berdasarkan media atau lingkungannya, olahraga rekreasi dapat diklasifikasikan ke dalam olahraga rekreasi darat, laut, dan udara. Olahraga rekreasi darat meliputi kegiatan seperti pendakian gunung, bersepeda, *hiking*, *outbound*, dan berkemah. Sementara itu, olahraga rekreasi laut mencakup selancar, *snorkeling*, *diving*, dan *canoeing*, sedangkan olahraga rekreasi udara meliputi paralayang, gantole, dan *skydiving* (Lestari, A. P., (2021).

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki kekayaan alam luar biasa yang berpotensi menjadi basis pengembangan olahraga rekreasi berbasis alam salah satunya pendakian. Menurut Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Indonesia memiliki sekitar 500 gunung api, di mana 127 di antaranya berstatus aktif dan dipantau oleh PVMBG untuk mitigasi bencana vulkanik. Selain itu, menurut data topografi, terdapat sekitar 270 gunung di Indonesia yang memenuhi kriteria puncak signifikan (*Ribus*), bukan hanya memiliki nilai estetika dan keindahan panorama, tetapi juga menjadi magnet bagi wisatawan untuk melakukan pendakian. Salah satu contoh adalah Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGGP) di Jawa Barat, yang pada tahun tertentu mencatat 647.153 pengunjung,

termasuk 30.275 wisatawan mancanegara (Jurnal Kepariwisata Indonesia). Angka ini menandakan tingginya permintaan terhadap layanan pendakian, termasuk kebutuhan pemandu gunung profesional.

Pendakian gunung merupakan salah satu bentuk olahraga alam yang memadukan petualangan, daya tahan fisik, dan ketahanan mental. Daya tarik gunung terletak pada keindahan alam, tantangan fisik, serta kepuasan batin setelah mencapai puncak. Di balik daya tarik tersebut, terdapat berbagai potensi bahaya yang dapat mengancam keselamatan dan kenyamanan pendaki. Faktor cuaca, medan yang sulit, keterbatasan pengetahuan pendaki, serta kurangnya persiapan sering menjadi penyebab utama terjadinya kecelakaan di gunung. Penelitian Firmansyah, dkk (2019) menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan pendaki saat ini terkait penanganan pertama hipotermia masih tergolong rendah. Hal ini sejalan dengan temuan Susilowati dkk (2020), yang menyatakan bahwa ada hubungan signifikan antara tingkat pengetahuan dengan perilaku penanganan gawat darurat hipotermia di kalangan pendaki gunung. Menurut Andhini dan Mustriwi (2021), banyak pendaki belum memahami tanda-tanda awal hipotermia maupun langkah-langkah pertolongan pertamanya. Hipotermia merupakan masalah yang sering diabaikan, terutama oleh pendaki pemula. Hal ini diperparah oleh minimnya edukasi formal atau informal tentang mitigasi risiko dalam kegiatan pendakian. Keterkaitan seorang pemandu gunung berfungsi untuk memastikan keselamatan pendaki, memberikan arahan teknis, membantu pengambilan keputusan di lapangan, serta menjadi penghubung antara pendaki dan pengelola kawasan gunung.

Kehadiran pemandu juga meningkatkan rasa aman dan kenyamanan pendaki, khususnya bagi pendaki pemula. Secara teoretik, pemandu berperan sebagai manajer risiko, fasilitator pengalaman, dan interpretator lingkungan yang memengaruhi kualitas pengalaman serta perilaku konservasi wisatawan (Bouhaouala, 2022; Ismail & Handrito, 2022). Lonjakan pengunjung tanpa pengelolaan profesional dapat menyebabkan degradasi lingkungan dan menurunkan kualitas pengalaman wisata. Pemandu gunung yang terlatih dapat memitigasi dampak ini melalui edukasi lingkungan dan manajemen risiko di lapangan

Kegiatan pemandu gunung tidak lagi dipandang sebagai aktivitas sukarela semata, melainkan telah berkembang menjadi profesi dan peluang karier. Dengan adanya sertifikasi kompetensi, standar operasional, serta organisasi profesi seperti Asosiasi Pemandu Gunung Indonesia (APGI), profesi pemandu gunung memiliki legitimasi dan arah pengembangan yang jelas. Profesi pemandu gunung di Indonesia diatur dalam sejumlah kebijakan resmi seperti kompetensi Nasional SKKNI Pemandu Gunung No.74 Tahun 2024. Regulasi ini dipertegas melalui PERMEN Pariwisata Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan SKKNI Bidang Pariwisata yang mewajibkan sertifikasi kompetensi kerja bagi pemandu wisata gunung.

Profesi pemandu gunung telah diatur dalam sejumlah kebijakan resmi. Mulai dari Konvensi Nasional SKKNI Pemandu Gunung (14 Desember 2009), Surat Direktur Standarisasi Pariwisata (9 Februari 2011), hingga Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor 138/MEN/V/2011 tentang Penetapan Rancangan SKKNI Sektor Pariwisata Bidang Pemandu Wisata Gunung

(27 Mei 2011). Regulasi ini dipertegas melalui PERMEN Pariwisata Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan SKKNI Bidang Pariwisata yang mewajibkan sertifikasi kompetensi kerja bagi pemandu wisata gunung. Pemandu gunung profesional berpeluang mengembangkan diri tidak hanya sebagai pendamping pendakian, tetapi juga sebagai instruktur, asesor uji kompetensi, konsultan keselamatan, hingga mitra teknis pengelolaan kawasan konservasi.

Asosiasi Pemandu Gunung Indonesia (APGI) yang berdiri sejak 15 Januari 2016 berupaya meningkatkan profesionalisme dengan pelatihan dan sertifikasi berbasis SKKNI. Hingga kini APGI DKI memiliki 230 pemandu gunung bersertifikat, didukung oleh 121 instruktur dan 27 asesor. Penelitian tentang Asosiasi Pemandu Gunung Indonesia (APGI) menunjukkan capaian penting terkait kode etik, spesialisasi, dan standar kerja, namun juga mencatat tantangan berkelanjutan pada aspek kesejahteraan dan pemerataan pelatihan (Hanafi, 2023). Di sisi pengelolaan jalur, implementasi standar pendakian (SNI 8748:2019) dinilai membantu peningkatan kesiapsiagaan dan layanan, meski capaian antar-lokasi masih bervariasi (Putri, dkk., 2023).

Provinsi DKI Jakarta merupakan salah satu basis sumber daya manusia kepemanduan gunung diantaranya didukung oleh komunitas pendaki, lembaga pelatihan, serta organisasi profesi seperti Asosiasi Pemandu Gunung Indonesia (APGI) DPPProv DKI Jakarta. Dalam lingkup wilayah DKI Jakarta, meskipun tidak memiliki kawasan gunung secara langsung, aktivitas kepemanduan gunung tetap berkembang. Banyak pemandu gunung berdomisili di wilayah ini dan aktif

memandu pendakian ke berbagai gunung di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan daerah lainnya.

APGI DPProv DKI Jakarta secara aktif menyelenggarakan berbagai program pengembangan kompetensi, seperti pelatihan dasar kependamuan, peningkatan keterampilan teknis, serta fasilitasi uji kompetensi berbasis SKKNI. Berdasarkan data organisasi, terdapat ratusan pemandu yang terdaftar dan mengikuti proses sertifikasi. Program-program tersebut menjadi jalur utama bagi pemandu lokal untuk memasuki dunia profesi pemandu gunung yang lebih terstruktur dan profesional, sekaligus membuka peluang karier di bidang kependamuan, pelatihan, maupun peran teknis lainnya dalam pariwisata alam.

Berdasarkan uraian di atas menunjukkan bahwa profesi pemandu gunung telah memiliki kerangka regulasi dan organisasi yang jelas melalui SKKNI dan APGI. Belum terdapat gambaran empiris mengenai sejauh mana pemandu gunung telah memenuhi standar kompetensi sebagai dasar keterkaitan mereka dengan sistem profesi APGI. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis potensi karir pemandu gunung berdasarkan tingkat kesesuaian kompetensi pemandu gunung dengan SKKNI dalam kerangka profesionalisasi yang direpresentasikan oleh APGI. Penelitian ini akan menganalisis potensi karir pemandu gunung dengan mengacu pada dimensi pariwisata alam regional, sistem pelatihan dan sertifikasi, serta tantangan di lapangan. Hasilnya diharapkan memberikan rekomendasi strategis yang mampu memperkuat profesionalisme dan daya saing pemandu gunung di era pertumbuhan wisata alam yang pesat.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi penelitian dengan judul Analisis potensi karier pemandu gunung tropis di Indonesia antara lain:

1. Aktivitas pendakian gunung memiliki risiko keselamatan yang tinggi, sementara tingkat pengetahuan dan kesiapsiagaan pendaki masih tergolong rendah, khususnya dalam penanganan kondisi darurat seperti hipotermia.
2. Peran pemandu gunung sangat strategis dalam menjamin keselamatan, kenyamanan, dan kualitas pengalaman pendaki
3. Pemerintah telah menetapkan SKKNI Pemandu Gunung sebagai standar nasional kompetensi, namun tingkat kesesuaian kompetensi pemandu di lapangan terhadap standar tersebut belum tergambarkan secara empiris.
4. Asosiasi Pemandu Gunung Indonesia (APGI) telah menjadi wadah profesionalisasi pemandu gunung melalui pelatihan dan sertifikasi, tetapi keterkaitan nyata antara pemandu gunung di lapangan dengan sistem profesi APGI.
5. Pemandu gunung, khususnya yang berada dalam lingkup APGI DPProv DKI Jakarta, memiliki peluang karier yang luas, namun potensi tersebut sangat bergantung pada tingkat pemenuhan kompetensi berdasarkan SKKNI.

C. Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan mendalam, maka terdapat beberapa batasan yang perlu diperhatikan:

1. Penelitian ini hanya difokuskan pada pemandu gunung yang berada dalam lingkup Asosiasi Pemandu Gunung Indonesia (APGI) DPProv DKI Jakarta.
2. Subjek penelitian dibatasi pada pemandu gunung yang berada dalam jalur profesionalisasi kepemanduan gunung di bawah kerangka APGI
3. Analisis kompetensi pemandu gunung dalam penelitian ini hanya mengacu pada beberapa unit kompetensi dalam Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Pemandu Gunung yang dipilih sesuai dengan tujuan penelitian.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat kompetensi pemandu gunung berdasarkan kompetensi SKKNI?
2. Bagaimana tingkat kompetensi pemandu gunung dalam mendukung potensi pengembangan karier serta peningkatan kualitas layanan wisata petualangan di Indonesia?

E. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoretis maupun praktis, di antaranya:

1. Bagi Pemandu Gunung: Memberikan wawasan tentang cara meningkatkan keterampilan dan kompetensi mereka, serta memberikan

gambaran mengenai peluang karier yang ada di sektor pariwisata petualangan.

2. Bagi Pemerintah: Memberikan rekomendasi mengenai pentingnya regulasi dan pengakuan terhadap profesi pemandu gunung, serta bagaimana cara meningkatkan kesejahteraan pemandu gunung melalui kebijakan yang mendukung.
3. Bagi Pengelola Destinasi Wisata Gunung: Memberikan informasi tentang pentingnya meningkatkan kualitas pemandu gunung agar dapat memberikan pengalaman yang lebih baik kepada wisatawan dan memastikan keselamatan selama pendakian.
4. Bagi Masyarakat Umum: Meningkatkan kesadaran akan pentingnya peran pemandu gunung dalam pariwisata petualangan serta mendorong pengakuan terhadap profesi ini sebagai bagian yang esensial dalam industri pariwisata Indonesia.
5. Bagi Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Jakarta (FIKK UNJ), Penelitian ini dapat menjadi Referensi dan dasar bagi Program Studi Olahraga Rekreasi untuk merancang program pelatihan atau sertifikasi yang dapat memperkuat keterampilan dan pengetahuan mahasiswa dalam bidang pemanduan pendakian gunung. Pelatihan ini tidak hanya akan meningkatkan kesiapan mahasiswa untuk berkarier sebagai pemandu gunung, tetapi juga meningkatkan kualitas pelayanan pemandu gunung secara keseluruhan.